

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anwar C, 2008, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Malang: Rajawali.

Adnan Buyung Nasution, 1997, "*Lembaga Kepresiden Masa Depan*", dalam *Tidak Tak Terbatas: Kajian Atas Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Pandega Media.

Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Umpam Press.

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Cevia.

Hamdan Zoelfa, 2005, *Impeachment President: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi.

H. A.W.Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

H. Zainal Rifin, 2006, *Fungsi Komisi Yudisial dalam Reformasi Peradilan Sesudah dan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Keadilan*, Jakarta: ELSAM.

-----, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Markus Gunawan, 2008, *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif, DPR, DPRD dan DPR*, Jakarta: Visi Media.

Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Saldi Isra, 2020, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Sri Soemantri, 1993, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Cetakan VII, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

-----, 1993, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Jurnal dan Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Angket_Dewan_Perwakilan_Rakyat.

<https://business-law.binus.ac.id/2017/02/22/sekilas-perihal-hak-angket-dpr/>.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/201b1a0b9257bc5a1584853b7810bf1b.pdf.

<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>.

Novianto M Hantoro, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Hak Angket DPR RI", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8 No. 2 November 2017.

Nurush Sobahah, 2017, "Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Fiqih Siyasah", <https://media.neliti.com/media/publications/178338-ID-penggunaan-hak-Interpelasi-dewan-perwaki.pdf>.

Ratnia Solihah dan Siti Witianti, 2016, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya", *COSMOGOV*, Vol. 2 No. 2, <http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/10010/pdf>.

Sulkaris S Lepa Ratu, 2017, "Hakikat Hak Angket Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Surabaya: *Mimbar Keadilan Jurnal Hukum*, <https://media.neliti.com/media/publications/278217-hakikat-hak-angket-anggota-dewan-perwaki-da7e20bd.pdf>.

Sunarto, 2018, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR (Perbandingan antara Era Orde Baru dan Era Reformasi)*, *Integralistik*, No. 1.

Yudiono OS, 2013, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id.